

## TELAAH FIQH SIYASAH DAN PATOLOGI SOSIAL TERHADAP KONSEP ZERO KEMISKINAN DALAM LIMA PILAR PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR

*Ismardi, M.Ag & Arisman*

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### **Abstrak**

*Penghapusan kemiskinan dari sebuah masyarakat merupakan tugas utama dari pemerintah. Islam menginginkan terjadinya distribusi kekayaan yang merata dengan menegakkan dan menerapkan hukum zakat, memberdayakan baitul mal, kharaj (pajak tanah), ghanaim (harta rampasan perang), dan melarang riba. Kegiatan ini memainkan peran yang sangat penting dan efektif untuk menghapuskan kemiskinan dan kondisi sulit dalam masyarakat. Konsep zero kemiskinan ini khusus di Kabupaten Kampar, ada hal-hal yang mesti jadi perhatian agar program ini dapat diwujudkan dengan tidak terlalu lama, antara lain : pertama, Pemerintah kabupaten Kampar hendaknya selalu mengevaluasi, karena fakta dilapangan didapati bahwa banyak diantara masyarakat yang telah dibina di balai pelatihan pertanian terpadu Kampar tidak memperoleh kesempatan untuk menikmati pinjaman modal yang telah dijanjikan Pemkab. Ini disebabkan karena dana tersebut bisa diperoleh melalui mekanisme pengajuan proposal yang disertai agunan, sedangkan mereka adalah masyarakat ekonomi lemah yang tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan agunan. Kedua, Menciptakan hubungan dan komunikasi secara bijak dengan berbagai pihak.*

### **Abstract**

*Elimination of poverty of a society is the main task of the government. Islam wants the equitable distribution of wealth by enforcing and applying the law of charity, empowering Baitul Mal, kharaj (land tax), ghanaim (spoils of war), and prohibits usury. These activities play a very important role and effective way to eliminate poverty and difficult conditions in the community. The concept of zero poverty specifically in Kampar, there are things that should be a concern for this program can be realized by not too long, among other things: first, the Government of Kampar should always evaluate, due to the fact the field is found that many of the people who have nurtured in Kampar integrated agricultural training centers do not have the opportunity to enjoy the capital loan that had been promised Regency. This is because these funds can be obtained through a mechanism that is accompanied by proposals of collateral, while they are economically weak people who do not have anything for collateral. Secondly, Creating wisely relationship and communication with various parties.*

**Kata Kunci:** Lima Pilar, Zero Kemiskinan, *Mashlahah*.

### **Pendahuluan**

Kemiskinan dalam perspektif ekonomi, didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan

meningkatkan kesejahteraan. Sumber daya dalam konteks ini tidak hanya aspek finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. Kemiskinan ini menggunakan indikator yang sifatnya materi, seperti kepemilikan harta benda, *income* perkapita, maupun konsumsi sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator konsumsi sebesar 21,00 kalori/ orang setiap hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu, atau pendekatan Bank Dunia yang menggunakan standar 1 Dolar AS/ orang setiap hari. Contoh kemiskinan ini adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan beserta akses lainnya, seperti kesehatan, pekerjaan maupun pendidikan.<sup>1</sup>

Kemiskinan dalam perspektif kesejahteraan sosial mengarah pada keterbatasan individu atau kelompok dalam mengakses jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.<sup>2</sup> Faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal, dalam hal ini bersumber dari si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan dan adanya hambatan budaya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar kemampuan seseorang tersebut, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang menghambat seseorang mendapatkan sumber daya. Secara sederhana kemiskinan dalam persepektif ilmu kesejahteraan sosial dimaknai sebagai kemiskinan yang pada awalnya disebabkan oleh kemiskinan ekonomi, kemudian dikarenakan terlalu lama dalam kondisi tersebut baik karena faktor tidak disengaja, disengaja, maupun karena dipelihara menyebabkan efek domino yaitu tumbuhnya patologi atau masalah-masalah sosial. Sedangkan resiko ketika kemiskinan sudah menjadi masalah sosial adalah selain harus menyelesaikan masalah ekonomi itu sendiri juga mengatasi masalah sosial yang timbul. Contohnya adalah munculnya kriminalitas, budaya malas, korupsi, disparitas sosial yang menyebabkan konflik, dan ketergantungan pada pihak lain.

Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan si miskin untuk bekerja atau karena malas, melainkan

---

<sup>1</sup> Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia; Suatu Analisis Awal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 37.

<sup>2</sup> Fery Sapta dan Supartono, *Gambaran Umum Kondisi dan Penyebab Kemiskinan*, (Jakarta: Kikis, 2005), hal.78.

karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah, maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, dan mereka yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural ini adalah pemerintah, karena pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin. Kalaupun ada, lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan, sehingga tidak ada masyarakat miskin yang 'naik kelas', artinya jika pada awalnya menjadi buruh, nelayan, pemulung, maka selamanya menjadi buruh nelayan dan pemulung, karena tidak ada upaya dalam menaikkan derajat dan kemampuan mereka, baik dalam kesempatan pendidikan atau pelatihan.

Sedangkan kebudayaan kemiskinan merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Ciri dari kebudayaan kemiskinan ini adalah masyarakat enggan mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-lembaga utama, sikap apatis, curiga, terdiskriminasi oleh masyarakat luas. Dalam komunitas lokal ditemui ada rumah yang bobrok, penuh sesak dan bergerombol. Di tingkat keluarga, masa kanak-kanak cenderung singkat, cepat dewasa, cepat menikah. Pada individu mereka ada perasaan tidak berharga, tidak berdaya dan rendah diri akut.

Pandangan lain tentang budaya kemiskinan adalah, bahwa kebudayaan kemiskinan merupakan efek domino dari belenggu kemiskinan struktural yang menghinggap masyarakat terlalu lama, sehingga membuat masyarakat apatis, pasrah, berpandangan jika sesuatu yang terjadi adalah takdir, dan dalam konteks keagamaan disebut dengan paham *jabariah* (*fatalism*), terlebih paham ini disebarkan dan didoktrinasikan dalam mimbar agama. Contoh kemiskinan ini ada pada masyarakat pedesaan, komunitas kepercayaan atau agama, dan kalangan marginal lainnya.

Langkah nyata dimulai dengan penetapan visi dan misi Kabupaten Kampar. Visi Pembangunan Kabupaten Kampar tahun 2012-2016 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar yang Madani, Berakhlak, dan Bermoral Menuju Kehidupan yang Sehat, Sejahtera serta Berdaya Saing pada Tahun 2016”.<sup>3</sup> Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Kampar periode 2012-2016 ada lima. *Pertama*, mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertakwa, menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin sistem sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global. *Kedua*, mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan SDM yang bermartabat melalui penguasaan IPTEK yang ditopang sendi-sendi ilmu, iman dan peradaban, untuk menghasilkan manusia yang berdaya saing global. *Ketiga*, mengembangkan potensi SDM dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh. *Keempat*, mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. *Kelima*, mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Pandangan dan Pengertian Kemiskinan Secara Umum**

Kondisi dan fenomena kemiskinan yang mengungkung sebagian besar masyarakat kita hingga kini masih menyimpan banyak perdebatan. Perdebatan tersebut terutama seputar teori, konsep maupun metode-metode yang menyangkut tentang kondisi kemiskinan di sekitar kita. Perdebatan dimulai dengan penyusunan konsep, indikator, dan langkah langkah termasuk kebijaksanaan yang harus diambil berhubungan dengan cara mengatasinya, atau dengan bahasa praktisnya penanggulangan kemiskinan. Hal ini menjadi makin menjadi kontras, tatkala pihak-pihak yang mengalami atau berada dalam ‘kondisi miskin’ terus bertambah jumlah maupun tingkat kemiskinannya.

Perbedaan pandangan dari setiap ahli tentang kemiskinan merupakan hal yang wajar. Hal ini karena data, dan metode penelitian yang berbeda, tetapi justru terletak pada latar belakang idiologisnya. Menurut Weber,<sup>4</sup> ideology bukan saja

<sup>3</sup> Sumber : Bagian Humas Pemerintah Kabupten Kampar tahun 2012

<sup>4</sup> Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, Edited with an introduction by Talcott Person ( New York : The Free Press, 1964) hlm. iii

menentukan macam masalah yang dianggap penting, tetapi juga mempengaruhi cara mendefinisikan masalah sosial ekonomis, dan bagaimana masalah sosial ekonomi itu diatasi. Kemiskinan disepakati sebagai masalah yang bersifat sosial ekonomi, tetapi penyebab dan cara mengatasinya terkait dengan ideologi yang melandasinya. Untuk memahami ideologi tersebut ada tiga pandangan pemikiran yaitu konservatisme, liberalisme, dan radikalisme. Penganut masing-masing pandangan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum konservatif memandang kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras, boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis, dan tidak ada hasrat untuk berpartisipasi.

Menurut Oscar Lewis,<sup>5</sup> orang-orang miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis sosial, dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam *realistic and situational adaptation* pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif, produktif dan kreatif.

Philips dan Legates mengemukakan empat pandangan tentang kemiskinan, yaitu *pertama*, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari si miskin yang cenderung menghambat untuk melakukan perbaikan nasibnya. Akibatnya, si miskin tidak melakukan rencana ke depan, menabung dan mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi. *Kedua*, kemiskinan dipandang sebagai akibat dari sub budaya tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang

---

<sup>5</sup> Oscar Lewis, “*Kebudayaan Kemiskinan*”; dalam *Kemiskinan di Perkotaan*, di edit oleh Parsudi Suparlan, ( Jakarta : Sinar Harapan-Yayasan Obor, 1983), hlm. 78

memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya. **Ketiga**, kemiskinan dipandang sebagai akibat kurangnya kesempatan, kaum miskin selalu kekurangan dalam bidang keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan dalam masyarakat. **Keempat**, bahwa kemiskinan merupakan suatu ciri struktural dari kapitalisme, bahwa dalam masyarakat kapitalis segelintir orang menjadi miskin karena yang lain menjadi kaya. Jika dikaitkan dengan pandangan konservatisme, liberalisme dan radikalisme, maka poin pertama dan kedua tersebut mencerminkan pandangan konservatif, yang cenderung mempersalahkan kemiskinan bersumber dari dalam diri si miskin itu sendiri. Ketiga lebih mencerminkan aliran liberalisme, yang cenderung menyalahkan ketidakmampuan struktur kelembagaan yang ada. Keempat dipengaruhi oleh pandangan radikalisme yang mempersalahkan hakekat atau perilaku negara kapitalis.

Masing-masing pandangan tersebut bukan hanya berbeda dalam konsep kemiskinan saja, tetapi juga dalam implikasi kebijakan untuk menanggulangnya. Keban menjelaskan bahwa pandangan konservatif cenderung melihat bahwa program-program pemerintah yang dirancang untuk mengubah sikap mental si miskin merupakan usaha yang sia-sia karena akan memancing manipulasi kenaikan jumlah kaum miskin yang ingin menikmati program pelayanan pemerintah. Pemerintah juga dilihat sebagai pihak yang justru merangsang timbulnya kemiskinan. Aliran liberal yang melihat si miskin sebagai pihak yang mengalami kekurangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pekerjaan dan perumahan yang layak, cenderung merasa optimis tentang kaum miskin dan menganggap mereka sebagai sumber daya yang dapat berkembang seperti halnya orang-orang kaya. Bantuan program pemerintah dipandang sangat bermanfaat dan perlu direalisasikan. Pandangan radikal memandang bahwa kemiskinan disebabkan struktur kelembagaan seperti ekonomi dan politiknya, maka kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perubahan kelembagaan ekonomi dan politik secara radikal.

Menurut Flanagan, ada dua pandangan yang berbeda tentang kemiskinan, yaitu *culturalist* dan *structuralist*. Kulturalis cenderung menyalahkan kaum miskin, meskipun kesempatan ada mereka gagal memanfaatkannya, karena terjebak dalam

budaya kemiskinan. Strukturalis beranggapan bahwa sumber kemiskinan tidak terdapat pada diri orang miskin, tetapi adalah sebagai akibat dari perubahan priodik dalam bidang sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, rendahnya tingkat upah, diskriminasi dan sebagainya. Implikasi dari dua pandangan ini juga berbeda, terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan perubahan aspek kultural misalnya perubahan kebiasaan hidup. Hal ini akan sulit dan memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit. Terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan perubahan struktur kelembagaan seperti kelembagaan ekonomi, sosial dan kelembagaan lain yang terkait.

Memahami substansi kemiskinan merupakan langkah penting bagi perencana program dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Sutrisno, ada dua sudut pandang dalam memahami substansi kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengikuti pikiran kelompok *agrarian populism*, bahwa kemiskinan itu hakekatnya, adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Dalam pandangan ini, orang miskin mampu membangun diri mereka sendiri apabila pemerintah memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur diri mereka sendiri. Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Disamping itu, kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai sudut pandang tentang kemiskinan di Indonesia dalam memahami kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya orang luar untuk memahami tentang kemiskinan. Hingga saat ini belum ada yang mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri.

Kajian Chambers<sup>6</sup> lebih melihat masalah kemiskinan dari dimensi si miskin itu sendiri dengan *deprivation trap*, tetapi Chambers sendiri belum menjelaskan tentang alasan terjadinya *deprivation trap* itu. Dalam tulisan ini dicoba menggabungkan dua sudut pandang dari luar kelompok miskin, dengan mengembangkan lima unsur keterjebakan yang dikemukakan oleh Chambers,

---

<sup>6</sup> Robert Chambers, terjemahan *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, (Jakarta : LP3S, 1983), Hlm. 54

yaitu : (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) Keterasingan, (4) Kerentanan, dan (5) Ketidak berdayaan.

Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah BAPPENAS mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Levitan mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Faturchman dan Marcelinus Molo<sup>7</sup> mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Elli<sup>8</sup> kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Menurut Suparlan<sup>9</sup> kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Reitsma dan Kleinpenning mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Friedman<sup>10</sup> mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksetaraan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu pengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

---

<sup>7</sup> Faturrochman & Marcelinus Molo, *Karakteristik Rumah Tangga Miskin*. Populasi, Volume 5, Nomor 1, tahun 1994, hlm. 4

<sup>8</sup> Ellis, *The Demotion of Poverty*. Social Indicator Research, 1994

<sup>9</sup> Pasudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, ( Jakarta : Yayasan Obor,1993), hlm. 61

<sup>10</sup> John Friedman, *Empowerment : Politics of Allternation Development* ( Massachusetts : Blackwell Publisher, 1992 ), hlm. 22



Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers (dalam Chriswardani Suryawati )<sup>11</sup> mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.<sup>12</sup> Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

---

<sup>11</sup> Criswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. [http://www.jmpk-online.net/Volume 8/Vol 8 No 03 2005.pdf](http://www.jmpk-online.net/Volume%208/Vol%208%20No%2003%202005.pdf). Diakses tanggal 25 Agustus 2014

<sup>12</sup> *Ibid.*,

- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Nasikun dalam Chriswardani Suryawati,<sup>13</sup> beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena poal produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi ekspor.
- c. *Population growth*, prespektif yang didasari oleh teori Malthus , bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan seperti deraet hitung.
- d. *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pda petani dan nelayan ketika panenj raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. *Exploatif inetrmediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

- i. *Inetrnal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

### **Kemiskinan Menurut Para Ulama**

Kata “miskin” di dalam al-Qur’an biasa digandengkan dengan kata “*faqîr*” (Indonesia; fakir). Karena itulah dua istilah ini menjadi kajian khusus dalam melihat tolak ukur miskin didalam al-Qur’an.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “miskin” diartikan dengan “tidak berharta benda,” “serba kekurangan (berpenghasilan rendah).”<sup>14</sup> Sementara kata “fakir” mempunyai arti “orang yang sangat berkekurangan,” “orang yang sangat miskin,” “orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.”<sup>15</sup>

Al-Raghib al-Asfahani di dalam bukunya *al-Mufradât*, mengungkapkan kata “miskin” dalam istilah Bahasa Arab berasal dari akar kata “*sakana*” yang berarti “tenang,” yaitu tetapnya sesuatu setelah bergerak.<sup>16</sup> Sementara itu kata “miskin” di dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 25 kali.<sup>17</sup> Masih di dalam kitab *al-Mufradat*, al-Raghib al-Asfahani mengungkapkan kata “*faqîr*” yang pada asalnya berarti “sendi tulang” atau “badan yang patah.” Dikatakan juga berasal dari kata “*al-Fuqrah*” yang berarti “lubang.”<sup>18</sup> Sementara itu kata “*faqîr*” di dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 13 kali.<sup>19</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan definisi miskin dan fakir ini. Wahbah al-Zuhaili ketika menafsirkan ayat keenam puluh dari surat al-Taubah membedakan antara makna miskin dan fakir ini. Menurutnya “*al-fuqara*”

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 660.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 273.

<sup>16</sup>Al-Gharîb al-Asfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân* (Teheran: Maktabah Nazar al-Musthafa al-Baz,t,t), juz. 2, h. 312.

<sup>17</sup>Muhammad Fu’âd ‘Abdul Bâqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fâdzh al-Qur’ân al-Karîm*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1401 H/ 1981 M), h. 354.

<sup>18</sup>Al-Gharîb al-Asfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur’ân* (Teheran: Maktabah Nazar al-Musthafa al-Baz,t,t), juz. 2, h. 492

<sup>19</sup>Muhammad Fu’âd ‘Abdul Bâqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fâdzh al-Qur’ân al-Karîm*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1401 H/ 1981 M), h. 524-525

(mufrad: *faqir*) menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya, seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena kefakiran hidupnya. Sementara “*al-masakin*” (mufrad: *miskîn*) menunjukkan kepada seseorang yang memiliki harta dan usaha tetapi tidak dapat mencukupi keperluan hidupnya, seolah-olah ialah adalah orang yang lemah hidupnya.<sup>20</sup>

Perbedaan pendapat tentang yang manakah di antara dua kondisi ini yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lainnya? Menurut kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah, fakir lebih buruk kondisinya dari miskin. Sementara kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah mengatakan sebaliknya.<sup>21</sup>

Al-Qur’an dan hadis tidak menetapkan angka tertentu sebagai ukuran kemiskinan, termasuk yang manakah di antara keduanya, baik itu fakir atau miskin yang lebih layak dibantu. Akan tetapi Quraish Shihab menggolongkan kedua golongan ini sebagai orang yang memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhannya dan layak untuk dibantu.<sup>22</sup>

Kesimpulan ini dipertegas lagi dengan adanya pendapat bahwa pada prinsipnya orang miskin dan orang fakir adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai kebalikan dari orang kaya, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta seukuran satu nisab dari kebutuhan pokoknya dan anak-anaknya yang meliputi kebutuhan bidang sandang, pangan, papan, minuman, kendaraan, sarana untuk bekerja dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang tidak memiliki semua itu dapat dikategorikan sebagai orang *faqir* (Indonesia; fakir) yang berhak memperoleh zakat.<sup>23</sup>

Dalam upaya mengidentifikasi upaya-upaya pengentasan kemiskinan di dalam al-Qur’an, terlebih dahulu di sini akan dikemukakan tiga klasifikasi kemiskinan, sehingga akan diperoleh upaya pengentasan kemiskinan yang berangkat dari pembagian kemiskinan ini. Penggolongan kemiskinan yang

---

<sup>20</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz. 2, h. 259.

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 263.

<sup>22</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 449.

<sup>23</sup>Abuddin Nata, dkk, *Kajian Tematik al-Qur’an tentang Konstruksi Sosial*, (Bandung: Angkasa Raya, 2008), h. 154-155.

dimaksudkan di sini adalah kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan natural.

Pertama, kemiskinan kultural, yaitu keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang melekat dalam kebudayaan masyarakat, terutama yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri, misalnya kecenderungan untuk hidup boros, kurang menghargai waktu, dan kurang minat untuk berprestasi. Kedua, kemiskinan natural. Yaitu keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, baik yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) yang mengitarinya, misalnya faktor iklim, kesuburan tanah, dan bencana alam. Ketiga, kemiskinan struktural, yaitu keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penajajahan, pemerintahan yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan publik yang sentralistik, merajalelanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok Negara tertentu.<sup>24</sup>

Islam memang tidak menjadikan banyaknya harta sebagai tolok ukur kekayaan hakiki, karena kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati dan kepuasannya. Sebuah lingkaran betapapun kecilnya adalah sama dengan 360 derajat, tetapi betapapun besarnya, bila tidak bulat, maka ia pasti kurang dari angka tersebut. Karena itu, Islam mengajarkan apa yang dinamai *qana'ah*, namun itu bukan berarti *nrimo* (menerima apa adanya).

Al-Qur'an dalam menggambarkan kemiskinan menggunakan 9 diksi kata yang berbeda, yaitu *al-maskanah* (kemiskinan), *al-faqr* (kefakiran), *al-'âilah* (mengalami kekurangan), *al-ba'sa* (kesulitan hidup), *al-implâq* (kekurangan harta), *al-sâil* (peminta), *al-mahrûm* (tidak berdaya), *al-qâni* (kekurangan dan diam), *al-*, dan *al-dha'îf* (lemah). Kesembilan diksi kata di atas menyandarkan pada satu arti atau makna, yaitu kemiskinan dan penanggulangannya.

Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Hal ini sebagaimana yang sebutkan oleh al-Qur'an:

---

<sup>24</sup>Al. Suroyo, dkk, *Agama dan Kepercayaan Membawa Pembarua*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 97.

Artinya: “Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.” (QS. Al-Nisa [4]: 135).

Hal ini memang sejalan dengan sunatullah (hukum alam) sendiri. Kaya dan miskin sesungguhnya adalah hukum universal yang berlaku bagi semua manusia, apa pun keyakinannya. Karena itu tak ubahnya seperti kondisi sakit, sehat, marah, sabar, pun sama dengan masalah spirit, semangat hidup, disiplin, etos kerja, dan mentalitas.

Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena keterbatasan untuk berusaha (QS. Al-Baqarah [2]: 273), penindasan (QS. Al-Hasyr [59]: 8), cobaan Tuhan (QS. Al-An’am [6]: 42), dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan (QS. Al-Baqarah [2]: 61).

Kembali pada persoalan hukum alam di atas tentang keniscayaan adanya orang kaya dan orang miskin, maka sudah sepatutnya orang kaya (termasuk pemerintah) membantu orang miskin. Menurut Islam, dengan adanya bantuan orang kaya tersebut orang miskin tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat merendahkan martabatnya sendiri.

Islam sesungguhnya telah menyadari bahwa terkadang kefakiran akan menjadikan manusia pada kekufuran. Untuk itu Islam pun memberikan sumbangsih solusi penanggulangan kemiskinan dengan dua model; pertama, yaitu kategori wajib dilakukan, dan kedua, bersifat anjuran. Adapun yang wajib dilakukan adalah zakat (QS. Al-Taubah [9]: 103), infak wajib yang sifatnya insidental (QS. Al-Baqarah [2]: 177), menolong orang miskin sebagai ganti kewajiban keagamaan, misalnya membayar fidyah (QS. Al-Baqarah [2]: 184), dan menolong orang miskin sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum agama, misalnya membayar *kifarat* dengan memberi makan orang miskin (QS. Al-Maidah [5]: 95). Sedang yang bersifat anjuran untuk dilakukan adalah sedekah, infak, hadiah, dan lain-lainnya. Tentu saja semua hal di atas dilakukan bagi orang yang mampu secara finansial. Namun, bagi yang tidak mampu pun dalam hal itu diwajibkan juga, yaitu dengan memberikan nasihat, spirit, dan motivasi kepada kalangan rakyat jelata.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, al-Qur’an menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, -sebagaimana yang dijelaskan oleh Qureish

Shihab- yang secara garis besar dapat dirinci pada tiga hal pokok, yaitu; kewajiban setiap individu, kewajiban orang lain (masyarakat), dan kewajiban pemerintah. Pertama, kewajiban terhadap setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh al-Qur'an, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Artinya: *“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”* (QS Ali Imran [3]: 14).

Ayat ini secara tegas menggarisbawahi dua naluri manusia, yaitu naluri seksual yang dilukiskan sebagai kesenangan atau syahwat kepada (lawan seks), dan naluri kepemilikan yang dipahami dari ungkapan “kesenangan kepada harta yang banyak.” Sebagian pakar tafsir menyatakan bahwa seakan-akan al-Qur'an menjadikan kedua naluri itu sebagai naluri pokok manusia, karena teks ayat tersebut membatasi kesenangan hidup duniawi pada hasil penggunaan kedua naluri itu.

Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya, menjelaskan bagaimana naluri kepemilikan itu kemudian mendorong manusia bekerja dan berusaha. Hasil kerja tersebut apabila mencukupi kebutuhannya dalam istilah agama disebut *rizq* (rezeki), dan bila melebihinya disebut *kasb* (hasil usaha). Dengan demikian, kerja dan usaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan.<sup>25</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jalan pertama dan utama yang diajarkan al-Qur'an untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu. Banyak ayat yang memerintahkan dan mengisyaratkan kemuliaan bekerja. Segala pekerjaan dan usaha halal dipujinya, sedangkan segala bentuk pengangguran dikecam dan dicelanya. Allah berfirman: Artinya: *“Apabila engkau telah menyelesaikan satu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (pekerjaan yang lain, agar jangan*

---

<sup>25</sup>Abdurrahman ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Iskandaria: Dar Ibn Khaldun, t.t), h. 119.

mengganggu), dan hanya kepada Tuhanmu sajalah hendaknya kamu mengharap”. (QS. Alam Nasyrat [94]: 7-8).

Rasulullah Saw. juga pernah bersabda:

لَأَنْ يَحْتَتَبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ  
(رواه البخارى)

Artinya: “Salah seorang di antara kamu mengambil tali, kemudian membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya lalu dijualnya, sehingga ditutup Allah air mukanya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang, baik ia diberi maupun ditolak.” (HR. Bukhari).

Kalau di tempat seseorang berdomisili tidak ditemukan lapangan pekerjaan, al-Qur’an menganjurkan kepada orang tersebut untuk berhijrah mencari tempat lain, dan ketika itu pasti dia bertemu di bumi ini, tempat perlindungan yang banyak dan keluasan. Allah berfirman: Artinya: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 100).

Kedua, kewajiban orang lain tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib. Menggantungkan penanggulangan problem kemiskinan semata-mata kepada sumbangan sukarela dan keinsafan pribadi, tidak dapat diandalkan. Teori ini telah dipraktikkan berabad-abad lamanya, namun hasilnya tidak pernah memuaskan, karena orang sering kali tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki kelebihan harta kekayaan. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab keadilan sosial dapat terlaksana dengan baik.

Dalam hal ini, al-Qur’an walaupun menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsafan pribadi, namun dalam beberapa hal al-Qur’an ini menekankan hak dan kewajiban, baik melalui kewajiban zakat yang merupakan hak delapan kelompok yang ditetapkan (QS. Al-Taubah [9]: 60), maupun melalui



sedekah wajib yang merupakan hak bagi yang meminta atau yang tidak, namun membutuhkan bantuan. Allah berfirman: Artinya: *“Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang meminta) dan yang tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta).”* (QS. Al-Dzariyat [51]: 19).

Hak dan kewajiban tersebut mempunyai kekuatan tersendiri, karena keduanya dapat melahirkan ‘paksaan’ kepada yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Bukan hanya paksaan dan lubuk hatinya, tetapi juga atas dasar bahwa pemerintah dapat tampil memaksakan pelaksanaan kewajiban tersebut untuk diserahkan kepada pemilik haknya.

Dalam konteks inilah al-Qur’an menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakatnya. Boleh jadi karena satu dan lain hal seseorang tidak mampu memperoleh kecukupan untuk kebutuhan pokoknya, maka dalam hal ini al-Qur’an datang dengan konsep kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, atau dengan istilah lain jaminan antar satu rumpun keluarga sehingga setiap keluarga harus saling menjamin dan mencukupi. Allah berfirman: Artinya: *“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.”* (QS. Al-Anfal [8]: 75). Dan pada ayat lain artinya: *“Dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan.”* (QS. Al-Isra’ [17]: 26).

Ayat ini menggarisbawahi adanya hak bagi keluarga yang tidak mampu terhadap yang mampu. Dalam madzhab Hanafiyyah, memberi nafkah kepada anak dan cucu, atau ayah dan datuk merupakan kewajiban walaupun mereka bukan Muslim.

Para ahli hukum menetapkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah mencakup sandang, pangan, papan dan perabotnya, pelayan (bagi yang memerlukannya), mengawinkan anak bila tiba saatnya, serta belanja untuk istri dan siapa saja yang menjadi tanggungannya.

Selanjutnya mengenai zakat. Dari sekumpulan ayat-ayat al-Qur’an dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat dan kewajiban-kewajiban keuangan lainnya, ditetapkan oleh Allah sebagai pemilikannya yang mutlak atas segala sesuatu, dan

juga berdasarkan *istikhlaf* (penugasan manusia sebagai khalifah) dan persaudaraan sesama masyarakat, sebangsa, dan seprikemanusiaan. Apa yang ada dalam genggaman tangan seseorang atau sekelompok orang pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia diwajibkan menyerahkan kadar tertentu dari kekayaannya untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Bukankah hasil-hasil produksi, apa pun bentuknya, pada hakikatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang telah diciptakan dan dimiliki Tuhan? Bukankah manusia dalam memproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, atau perakitan satu bahan dengan bahan lain yang sebelumnya telah diciptakan Allah? Seorang petani berhasil dalam pertaniannya karena adanya irigasi, alat-alat (walaupun sederhana), makanan, pakaian, stabilitas keamanan, yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali oleh kebersamaan pribadi-pribadi tersebut, yang disebut juga dengan masyarakat. Siapa yang menjual dan siapa pula yang membeli kalau bukan orang lain?

Jelas sudah bahwa keberhasilan orang kaya adalah atas keterlibatan banyak pihak, termasuk para fakir miskin. Kalau demikian, wajar jika Allah Swt. sebagai pemilik segala sesuatu, mewajibkan kepada yang berkelebihan agar menyisihkan sebagian harta mereka untuk orang yang memerlukan. Allah berfirman: Artinya: *“Apabila kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan kepada kamu ganjaran, dan Dia tidak meminta harta bendamu (seluruhnya). Jika Tuhan meminta harta bendamu (sebagai zakat dan sumbangan wajib) dan Dia mendesakmu (agar engkau memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir, (karenanya Dia hanya meminta sebagian dan ketika itu bila kamu tetap kikir maka) Dia akan menampakkan kedengkian (kecemburuan sosial) antara kamu.”* (QS. Muhammad [47]: 36-37).

Menutupi kebutuhan tersebut dapat berupa modal kerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing, yang ditopang oleh peningkatan kualitasnya. Hal lain yang perlu juga dicatat adalah bahwa pakar-pakar hukum Islam menetapkan kebutuhan pokok dimaksud mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, seks, pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya, yang ketiga, kewajiban pemerintah. Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber

dana yang sah. Yang terpenting di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi.

Al-Qur'an mewajibkan kepada setiap Muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling tidak partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif. Secara tegas al-Qur'an menepi mereka yang enggan berpartisipasi (walau dalam bentuk minimal) sebagai orang yang telah mendustakan agama dan hari kemudian. (QS. Al-Ma'un [107]: 1-3).

### **Konsep Zero Kemiskinan Dalam Lima Pilar Pembangunan Kampar**

Konsep zero kemiskinan untuk masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Kampar bukanlah sekadar angan-angan. Konsepnya merupakan gagasan yang telah dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi. Mulai dari rumusan perencanaan, implementasi di tengah masyarakat hingga dampaknya bagi masyarakat luas. Setelah memetakan di setiap desa berapa jumlah keluarga miskin, keluarga pengangguran, dan keluarga yang memiliki rumah kumuh. Selanjutnya, diklasifikasikan berapa jumlah keluarga yang berkerja di bidang peternakan, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan paska panen. Setelah dapat dipetakan berapa jumlahnya, maka disediakan dana bagi mereka untuk mengikuti pelatihan.<sup>26</sup>

Pelatihan diadakan untuk 2.880 orang per tahun. Rinciannya untuk setiap angkatan berjumlah 120 orang selama dua pekan yang terdiri dari 48 orang bidang peternakan, 36 pertanian tanaman pangan, 24 perikanan, dan 12 paska panen. Kepada petani peserta diberikan pelatihan dalam bentuk materi 30 persen belajar dan 70 persen praktik, mulai dari bangun pagi, salat berjamaah, olahraga, mandi, sarapan, makan, dan mendengarkan ceramah agama menjelang tidur. Jadi, satu bulan didapat angka  $120 \times 2 = 240$  orang. Usai pelatihan mereka diberikan dana pinjaman bergulir yang berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, KKPE (APBN) dan dana dari Corporate Social Responsibility(CSR) perusahaan besar

---

<sup>26</sup> Ahmad (Staf Humas Pemkab Kampar), *Wawancara*, 15 September 2014

yang ada di daerah dengan bunga 6 persen per tahun. Ketika mereka pulang ke desa masing-masing setelah menyelesaikan pelatihan, mereka akan menjadi PPL swakarsa dan diwajibkan merekrut 10 orang untuk membuat kelompok tani, maka jumlahnya menjadi  $240 \times 10 = 2.400$  orang per unit usaha. Jika per unit usaha paling sedikit saja memakai tenaga 3 orang, maka dalam satu bulan akan bisa memberdayakan masyarakat  $2.400 \times 3 = 7.200$  orang, dan dalam masa satu tahun jumlah total  $7.200 \times 12 = 86.400$  orang.<sup>27</sup>

Untuk mewujudkan mimpi besarnya itu, Bupati Kampar (Jefry Noer) melaksanakan langkah-langkah untuk men-zero-kan kemiskinan.<sup>28</sup> *Pertama*, Pemkab Kampar me-mapping kondisi riil masyarakat Kampar di setiap desa melalui camat dan kepala desa, sehingga dapat diketahui berapa banyak kepala keluarga (KK) di setiap pedesaan yang masuk dalam kategori orang-orang miskin, serta sekaligus mendata berapa banyak KK masyarakat miskin itu yang berminat dan hobinya di bidang peternakan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya. *Kedua*, setelah di-mapping, selanjutnya dinas-dinas khususnya dinas terkait dengan pertanian terpadu membuat program-program untuk mengentaskan kemiskinan (peternakan, perikanan, pertanian pasca panen dan lain-lain), serta mengusulkan dan menyiapkan anggarannya. Dinas-dinas terkait dengan peningkatan ekonomi rakyat, dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan juga tidak diperbolehkan dilakukan dengan sistem proyek atau diproyekkan, tetapi dengan memberikan pinjaman dana bergulir. Kecuali proyek-proyek yang membantu program tersebut seperti peralatan dan lainnya. *Ketiga*, dari hasil mapping tersebut akan dibuatkan pelatihan untuk masyarakat miskin.

Pelatihan pertanian terpadu diikuti sebanyak 120 orang per angkatan yang dilaksanakan selama dua pekan, maka dalam satu bulan sebanyak 240 orang telah mengikuti pelatihan. Model pelatihan yang diterapkan mulai dari bangun pagi melaksanakan Salat Subuh, setelah itu dilanjutkan dengan melakukan olahraga lari dan senam. Usai mandi dan sarapan, pada pukul 8.00 pagi, peserta menuju ke tempat masing-masing untuk melakukan proses pembelajaran dengan konsep 30 persen teori dan 70 persen praktek lapangan. Pada malam harinya, diberi ceramah

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, ,

<sup>28</sup> Afrizal (Sekretariat BAPPEDA Kab. Kampar), *Wawancara*, 15 September 2014

agama untuk meningkatkan akhlak dan moral.<sup>29</sup> Keempat, bagi masyarakat yang lulus pelatihan sebanyak 240 orang tersebut, selanjutnya dipulangkan ke desa masing-masing dan langsung menjadi PPL Swakarsa dan wajib membuat kelompok tani di desanya.

Jadi satu orang merekrut 10 orang lainnya untuk membentuk satu kelompok tani. Kelompok ini nantinya juga akan diberikan pelatihan selama satu hingga dua hari, karena mereka sudah menjadi petani-petani yang tinggal dipoles saja. Jadi 240 orang X 10 orang = 2.400 orang ini diberikan pinjaman dana bergulir dengan maksimal dana pinjaman sebesar Rp100 juta per orang. Untuk satu bidang usaha yang dijalankan paling sedikit memakai tenaga tiga orang, jadi 2.400 X 3 orang = 7.200 orang telah terselamatkan dari kemiskinan dan pengangguran. Dalam setahun 7.200 X 12 bulan = 86.400 orang. Dalam waktu 2 tahun (24 bulan), maka 86.400 X 2 = 172.800 orang yang terlibat dan terserap dalam program ini.<sup>30</sup>

Dalam perkembangannya, program Zero Kemiskinan tidak hanya menyentuh masyarakat petani dan pedagang kecil, namun juga akan melibatkan anggota TNI, Polri serta masyarakat yang tengah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (LP). Untuk warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman di LP saat ini telah dijalin kesepakatan atau MoU antara Pemkab Kampar dan LP Bangkinang. Dalam MoU yang disepakati, masyarakat Kampar yang menjadi warga binaan LP akan diberikan pelatihan dan akan menjadi motivator di LP. Usai menjalani masa tahanan warga binaan yang telah mendapatkan pelatihan juga akan mendapatkan pinjaman dana bergulir, dengan cara ini kita berharap keluar dari LP mereka dapat memulai kehidupan baru di tengah masyarakat. Sedangkan untuk kerjasama dengan TNI, juga akan dilakukan dengan menitikberatkan sasaran peserta adalah para anggota Koramil melalui Babinsa di desa-desa di Kabupaten Kampar. Hal ini dimaksudkan, selain menjadi pembina teritorial di tempat mereka bertugas, keberadaan Babinsa di tengah masyarakat juga menjadi panutan warga setempat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Zulkifli, Kades Balam Jaya, *Wawancara*, 15 September 2014

<sup>30</sup> Afrizal, *Wawancara*.

<sup>31</sup> Chairunnas ( Staf SETDA Kampar), *Wawancara*, 16 September 2014

Keterlibatan para Babinsa dalam program Zero Kemiskinan, selain dapat meningkatkan penghasilan juga menjadi motivator warga. Untuk MoU yang disepakati menurut Kalapas Bangkinang, Bawon<sup>32</sup> mengakui, kepedulian yang ditunjukkan Bupati Kampar H Jefry Noer terhadap warga binaan, merupakan terobosan baru. Harapannya warga binaan yang telah mendapatkan pelatihan selepas menjalani masa hukuman dapat menjadi motivator di tempat mereka tinggal, dan memulai kehidupan baru.

Untuk menunjang percepatan zero kemiskinan, maka Pemkab Kampar telah membuat sejumlah program.<sup>33</sup> *Pertama*, Perkampungan teknologi di lahan seluas 500 hektare. Program ini dibuat bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dengan sistem dua hektare lahan untuk 10 KK, yaitu 4 KK untuk peternakan, 3 KK pertanian tanaman pangan, 2 KK untuk perikanan dan satu KK untuk pasca panen, sehingga kawasan lahan ini akan bisa menampung masyarakat miskin sebanyak 2.500 KK dengan penghasilan untuk peternakan, perikanan, pertanian di atas Rp3 juta per bulan. Di lahan dua hektare dikelola 10 KK dengan pola gotong royong dan hasilnya dibagi rata.

*Kedua*, membuat kecamatan mandiri energi di setiap rumah warga yang miskin. Ke depan akan ada sapi minimal 10 ekor. Untuk masak tidak perlu lagi memakai minyak tanah atau gas yang disubsidi oleh pemerintah, tetapi cukup memakai gas kotoran sapi. Di rumah-rumah warga akan dibuatkan bio gas, dan setiap rumah miskin tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya membeli minyak tanah dan gas. Karena pengeluaran itu sudah dihemat dengan pemakaian biogas. Buangan biogas akan dijadikan pupuk organik. Jadi di kecamatan, untuk memupuk tanaman pertanian tidak perlu lagi memakai pupuk kimia yang dibeli, tetapi cukup memakai pupuk organik buangan dari biogas. ‘’Insya Allah di kecamatan tersebut akan kita buat juga pabrik mini draniel pupuk organik yang akan bisa menambah penghasilan masyarakat tempatan,’’ ujarnya<sup>34</sup>.

*Ketiga*, di setiap desa akan dibuat Waserda yang akan dibina oleh tim yang dibentuk Bupati dan juga Disperindag Kampar. Alasannya, karena 9 bahan pokok

<sup>32</sup> Bawon (Ka. LAPAS Bangkinang), *Wawancara*, 16 September 2014

<sup>33</sup> Jhonkenedy, *Wawancara*, 15 September 2014

<sup>34</sup> Jefry Noer, Pidato pada temu ramah masyarakat di Kecamatan Kampar, Desember

sangatlah mahal di karena panjangnya rantai distribusi, maka Bupati Kampar akan memotong empat mata rantai sehingga distribusi sangat pendek (dari pabrik di Jakarta dikirim ke distributor daerah dan langsung ke masyarakat). Bahkan berdasarkan penelitian bisa menghemat 7-10 persen biaya dan Waserda tersebut dimiliki oleh masyarakat tempatan yang tidak mampu setelah melalui pelatihan dan diberikan pinjaman dana bergulir. Kempat, membuat sekolah unggulan terpadu. Sekolah tersebut berbasis entrepreneurship (wirausaha), mulai dari SMP, SMA sampai universitas dengan pola 30 persen teori, 70 persen praktek. Untuk anak-anak yang berprestasi dari keluarga tidak mampu akan diberikan beasiswa penuh oleh Pemkab, yang setengah mampu akan diberikan bantuan keringanan. Pendirian sekolah unggulan terpadu tersebut, dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

## Penutup

Manusia diwajibkan menyerahkan kadar tertentu dari kekayaannya untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Bukankah hasil-hasil produksi, apa pun bentuknya, pada hakikatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang telah diciptakan dan dimiliki Tuhan? Bukankah manusia dalam berproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, atau perakitan satu bahan dengan bahan lain yang sebelumnya telah diciptakan Allah? Seorang petani berhasil dalam pertaniannya karena adanya irigasi, alat-alat (walaupun sederhana), makanan, pakaian, stabilitas keamanan, yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali oleh kebersamaan pribadi-pribadi tersebut, yang disebut juga dengan masyarakat. Siapa yang menjual dan siapa pula yang membeli kalau bukan orang lain?

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Bogor: Prenada Media, 2003)
- Abdurrahman ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Iskandaria: Dar Ibn Khaldun, t.t)
- Abû Dâud Sulaimân ibn al-Asy'ats al-Sijistâni, *Sunan Abî Dâud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1404 H/ 1984 M), juz. 3
- Abuddin Nata, dkk, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Konstruksi Sosial*, (Bandung: Angkasa Raya, 2008)

- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012)
- Ahmad Rifa'i, dkk, *Strategi-Bisnis Usaha Kecil Di Bandar Lampung*. (Laporan Penelitian Hibah PDM Dikti November 2007)
- Akbar Shah Khan Najibabadi, *History of Islam*, (London: Darussalam International Publication, 2002) juz. 2
- Al-Gharîb al-Asfahânî, *al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân* (Teheran: Maktabah Nazar al-Musthafa al-Baz,t.t), juz. 2
- Ali ibn Ahmad ibn Sa'ad ibn Hazm ibn Ghalîb ibn Shâlih ibn Sufyân ibn Yazîd, *al-Muhalla fî Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), juz. 3
- Al-Imam al-Hafidz Abi al-Fadhl Jalaluddin bin Abd al-Rahman al-Suyuthi (w. 911 H), *al-Tausyih Syarh al-Jami` al-Shahih* (al-Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1419 H/1998 M)
- Al-Juwaini, *Ghiyats al-Umam fî at-Tiyats adh-Dhulam* (Iskandariah: Dar ad-Dakwah, 1400 H)
- Al-Khathabi, *Ma'alim as-Sunan* (Halb: Mathba'ah Muhammad Raghîb ath-Thabakh, tt) Juz IV
- Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthoniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, ditahqiq oleh Ahmad Abdus Salam (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006)
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, jilid II, h. 10; al-Amidi, *al-Ihkam*, jilid III, h. 48; al-Ghazali, *al-Mustashfa*, jilid I
- Anne Booth, *Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assesment*. Bulletin of Indonesian Economics Studies, Vol.36, No.1, 2000.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Balisacan, dkk, *Growth and Poverty Reduction in Indonesia: What Do Subnational Data Show?*. Bulletin of Indonesian Economics Studies, 2003 Vol 39. No. 3
- Criswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. [http://www.jmpk-online.net/Volume 8/Vol 8 No 03 2005.pdf](http://www.jmpk-online.net/Volume%208/Vol%208%20No%2003%202005.pdf). Diakses tanggal 25 Agustus 2014
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa`, 1999)
- Ellis, *The Demotion of Poverty*. Social Indicator Research, 1994
- Engkoswara & Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2010)
- Faturrochman & Marcelinus Molo, *Karakteristik Rumah Tangga Miskin*. Populasi, Volume 5, Nomor 1, tahun 1994
- Fery Sapta dan Supartono, *Gambaran Umum Kondisi dan Penyebab Kemiskinan*, (Jakarta: Kikis, 2005)
- Foster E. James dan Szekely, Miguel. *Is Economic Growth Good for the Poor? Tracking Low Incomes Using General Means*. Report on Symposium on Poverty Measurement, Mexico, 2002.
- Francois Bourguignon, Francois. *The Poverty-Growth-Inequality Triangle*. Report on Indian Council For Research on International Eco Relations, New Delhi. 2004.



- Garbis Iradian, *Inequality, Poverty, and Growth: Cross Country Evidence*. IMF Working Paper. Middle East and Central Asia Departement. 2005.
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998)
- Hassan Shadily (*Pem. Red. Umum*), *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid III, 1982)
- <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=lpptiainri-gdl-s1-1995-puji-617-kemiskinan>, (di akses pada tanggal, 24/2/2014, 22:29)
- <http://m.haluanmedia.com/riau/berita-daerah-riau/kampar/2012/12/26/lima-pilar-pembangunan-selama-setahun.html>
- <http://riaupos.co/daerah.php?act=full&id=4075#.Uwy0XKJ6PMw>
- <http://www.academia.edu/6713945/Kemiskinan> : Rizal Julianto
- Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- James. C. Knowles, James. C, *A Look at Poverty in The Developing Countries of Asia*. Asia-Pacific Population & Policy, No. 52, January 2002.
- John Friedman, *Empowerment : Politics of Allternation Development* (Massachusetts : Blackwell Publisher, 1992 )
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Lisa A Cameron, *Poverty and Inequality in Java: Examining the Impact of The Changing Age, Educational, and Industrial Structure*. Journal of Development Economics, Vol. 62 (2000).
- M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara; Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Maman Sukherman, *Assosiasi Kemiskinan Dengan Peubah Sosek di Propinsi Jawa Barat*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran. Vol. 3, No. 1, Januari 2001. William A Niskanen, *Welfare and Culture of Poverty*. The Cato Jurnal, Vol. 16, No. 1. 1996.
- Masrukhi, *Kemiskinan dimata Agama Islam dan Kristen (Studi Komparatif Kitab al- Qur'an dan Injil)*, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, Semarang, 2008
- Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organitation*, Edited with an introduction by Talcott Person ( New York : The Free Press, 1964)
- Michal Todaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Jilid I. Terjemahan Hasris Munandar. (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002)
- Muhaimin, dkk, *Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Muhammad Fu'âd 'Abdul Bâqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâdzh al-Qur'ân al-Karîm*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1401 H/ 1981 M)
- Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukum Fi al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Khatib al-Arabi)
- Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Niskanen, William A. *Welfare and Culture of Poverty*. (The Cato Jurnal, Vol. 16, 2006, No. 1)

- Oscar Lewis, “ *Kebudayaan Kemiskinan*”; dalam *Kemiskinan di Perkotaan*, di edit oleh Parsudi Suparlan, ( Jakarta : Sinar Harapan-Yayasan Obor, 1983)
- Pasudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, ( Jakarta : Yayasan Obor,1993)
- Poerdarminto W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, PN Balai Pustaka
- Rasyid Ridho, *Al-Khilafah au al-Imamah al-'Udhma, fi al-Wajih Kautsaroni, Ad-Daulah wa al-Khilafah fi al-Khithob al-'Arobi Abban al-Tsaurah al-Kamaliyah fi Turkiya: Dirosah wa Nushush* (Beirut: Dar ath-Tholi'ah, 1996)
- Rizwatul Islam, *The Nexus of Economic Growth, Employment and Poverty Reduction An Empirical Analysis*. Report on Seminar on Accelerating Growth and Poverty Reduction in Bangladesh. ILO, Geneva.2003.
- Robert Chambers, terjemahan *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, (Jakarta : LP3S, 1983)
- Roy Hendra, *Determinan kemiskinan*, (Jakarta : FE UI, 2010)
- Sayyid Ahmad al-Syalaini, *Khitâb Amîr al-Mu'minîn 'Alî ibn Abî Thâlib Karramallâhu Wajhah*, (Kairo: Maktabah Sahafah, 1409 H/ 1989 M)
- Soegijoko dan Kusbiantoro, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia* , (Jakarta : Grasindo, 997)
- Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006)
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. ke-4, 1998)
- Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS* (Jakarta : Gramedia, 1999)
- Suroyo, dkk, *Agama dan Kepercayaan Membawa Pembarua*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006)
- Sutyastie Soemitro Remi dan Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia; Suatu Analisis Awal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- T. F. Corney, *Content Analysis a Teach Nique For Systematic Infrence from Communication*, (London: B. T. Bats Ford, 1972)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- Tri Pranadji, *Transformasi Kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Pedesaaan* ( Bengkulu : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003)
- Tulus T.H Tambunan, Tulus T.H. *Transformasi Ekonomi Di Indonesia*. ( Jakarta : Salemba Empat, 2001).
- Umi Laila, *Kemiskinan dlam Al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Tafsir Kabîr wa Al- Mafâtih Al-Ghaîb Karya Fakhr Al-Razi)*, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, Semarang, 1999
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid VIII
- Wahbah al-Zuhailî, *Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz. 2

- Wie, Thee Kian. 1983. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif*. (Jakarta: LP3ES,1983)
- Yanto Bashri, *Mau Ke Mana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti*. (Jakarta: Prenada,2003)
- Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995
- \_\_\_\_\_, *Teologi Kemiskinan, Doktrin dasar dan Solusi Islam atas problem kemiskinan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2002